PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)

Azwir Nasir dan Ranti Oktari

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada 55 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey. Pengumpulan data primer dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution). Pengujian data yang digunakan untuk regresi linear berganda adalah uji kualitas data dan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,063 dengan signifikansi 0,177 (alpha 0,05). Pengendalian Intern memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan koefisien regresi 0,068 dan signifikansi 0,008 (alpha 0,05). Sedangkan nilai R square yaitu sebesar 0,174 yang berarti sebesar 17,4% variabel independen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen.

Kata Kunci : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Kinerja Instansi Pemerintah

PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan UU No. 28 tahun 1999 tentang hal yang sama. Menanggapi mandat tersebut maka dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya sebagai wujud akuntabilitas.

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi

informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif,

Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan pelayanan (Parasuraman et al., 1988 dalam Mardjiono 2009), dimana dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat.

Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat

Penelitian yang dilakukan oleh Bandi, (2006) menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tersebut. Begitu juga dengan Rahadi (2007) yang sama dengan Jayanti (2008) juga menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Mardjiono (2009) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi yaitu RSUD di Kabupaten Temanggung.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Dalam penelitian Prasetyono dan Kompyurini (2007) tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (survey pada rumah sakit di Jawa Timur) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan *good governance* terhadap kinerja organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah tentunya berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana setiap daerah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kembali bagaimana pengaruh Pemanfaatan Informasi Teknologi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: apakah ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Tujuan untuk penelitian ini untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menyediakan informasi sebagaimana pentingnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dan bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance.*

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut O'Brien (2006:28) dalam Wijana (2007) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Menurut Aji (2005:6) dalam Wijana (2007) informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al.* (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

2. Pengendalian Intern

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern : (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern, SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam UU No. 60 tahun 2008 terdiri atas unsur (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi dan (e) pemantauan pengendalian intern.

3. Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Mardiasmo (2002-a:21) dalam Legina (2008) mengemukakan kinerja program berhubungan dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya. Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator *input, output, outcome, benefit dan impact*. Dalam kenyataan, indikator yang dapat dengan tepat diidentifikasi hanyalah *input dan output,* sedangkan indikator yang lain lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya (Solikhin, 2006).

Menurut Bastian (2005: 267) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan

memperhitungkan indikator. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah masukan *(inputs*), keluaran *(outputs),* hasil *(outcome),* manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menetapkan indikator-indikator dan target kinerja dan mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk dievaluasi. Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan akuntabilitas (Audit Commision, 2000 dalam Sihaloho (2005).
Kinerja pemerintah daerah dengan sendirinya merupakan keseluruhan capaian atau hasil-hasil selama pelaksanaan otonom daerah. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang diharapkan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menanggapi instruksi tersebut, Lembaga Administrasi Negara dan BPKP menyusun buku pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertikal yaitu laporan kepada instansi yang diatasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 (Sumber: Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003 dalam Sihaloho, 2005).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap sebagai berikut :
1. Penetapan rencana strategik
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Pada PP 25/2005, pernyataan yang lebih tegas berkaitan dengan prestasi kerja atau kinerja antara lain dapat ditemukan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Keuangan.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson *et.al*. (1991) dalam Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Goodhue dan Thompson (1995) dalam Setiawan (2005) menyarankan agar konsep pemanfaatan teknologi berkaitan dengan dua hal : menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Pemanfataan teknologi informasi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2007) menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Mardjiono (2009) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijana, 2007 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten Tebanan. Sedangkan menurut Novita (2008) tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi

dengan kinerja individual akuntan intern pada beberapa bank di Pekanbaru.

Hipotesis 1 : Terdapat hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi pemerintah.

2. Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil penelitian Prasetyono dan Kompyurini (2007) tentang analisis kinerja rumah sakit daerah dengan pendekatan *balanced scorecard* berdasarkan komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) survei pada rumah sakit daerah di Jawa Timur menyimpulkan bahwa komitmen organisasi, pengendalian intern dan *good corporate governance* secara simultan variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja RSD.

Demikian juga dengan hasil penelitian Hiro Tugiman (2000), mengenai pengaruh peran auditor intern serta faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan disimpulkan bahwa manajemen puncak sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Selain itu Dedi Supardi (2004) yang meneliti mengenai pengaruh peran dewan komisaris, formulasi strategi dan penerapan pengendalian intern serta pengembangan tata kelola perusahaan terhadap kinerja bisnis menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja bisnis.

Selain itu, pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang tekait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Hipotesis 2 : Terdapat hubungan antara Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Model Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, maka dapat digambarkan model penelitian ini :

Model Penelitian

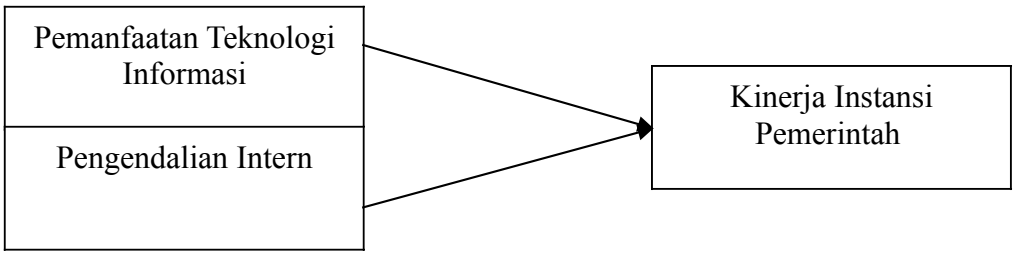

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer

diperoleh dengan memberikan kuesioner (*mail quesioner*) yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden yaitu kepala dinas/badan/kantor pada 55 Satuan Kerja Pemerintahan di Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari referensi-referensi dari buku, internet ataupun data instansi terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas dan instansi pemerintahan terkait di Kampar yang berjumlah 55 unit. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas instansi terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel nonprobabilitas dengan *Purposive sampling,* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yang dilakukan dengan pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Indriantoro dan Bambang, 2002:131).

Pengukuran instrumen pada setiap variabel pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan *Skala Likert*. Dengan skala penilaian (skor) 1 sampai dengan 5 guna mengukur sejauh mana pengaruh variable-variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana, masing-masing variabel diberi daftar pertanyaan yang diambil dari kuesioner. Kemudian masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawaban ektrim negatif dan nilai 5 untuk jawaban ekstrim positif.

Pada penelitian ini juga dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar pengukuran data yang dilakukan diyakini dapat memberikan hasil dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kesimpulan dari uji validitas dan reliabilitas atas tiga instrumen yang terlibat adalah valid dan reliable. Karena skala pengukuran item pernyataan adalah skala ordinal, maka perhitungan validitas menggunakan *correlation pearson*.

Apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor menunjukkan hasil > 0,450 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Ukuran reliabilitas ditunjukkan oleh *cronbach alpha*, batasan nilai minimum *Alpha* dalam penelitian ini adalah 0.60 (Nunnally, 1970). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu software SPSS versi 17. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Adapun model persamaan statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

a	=	konstanta
b_1 - b_2	=	koefisien regresi
X_1	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X_2	=	Pengendalian Intern
Y	=	Kinerja Instansi Pemerintah
E	=	Standar Error

Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Gujarati, 1991 dalam Miftahul jannah, 2010). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak bisa dipenuhi.

Uji Koefisien Regresi Parsial (uji-t)

Pengujian koefisien regresi parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikan t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{table} atau dengan melihat P_{value} masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi ditentukan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

1. Pengembalian Kuesioner

Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk survey dengan menggunakan pendekatan *explanatory research* atau penelitian penjelasan. Lingkup penelitian ini hanya difokuskan pada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Kampar yaitu yang berjumlah sebanyak 55 satuan kerja.

Dari 55 satuan kerja yang telah dikirimkan kuesioner sebanyak 55 buah dalam penelitian ini, dari semuanya, yang kembali sebanyak 40 buah (72,73%), sedangkan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 15 buah (27,27 %). Setelah dilakukan pemeriksaan, semua kuesioner yang kembali terisi dengan lengkap, sehingga kuesioner layak dianalisis.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

	Jumlah
Kuesioner yang disebar	55
Kuesioner yang kembali	40
Tingkat pengembalian kuesioner 40/55 x 100%	72,73 %
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	40

Dari 40 kuesioner yang diolah, diketahui bahwa 92,5% atau sebanyak 37 orang pejabat Kabupaten Kampar berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 3 orang atau 7,5% lainnya berjenis kelamin perempuan.

Komposisi para pejabat tersebut berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir disajikan dalam tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2 Gambaran Umum Responden

Keterangan	**Jumlah**	**Persentase**
Jenis kelamin		
- Laki-laki	37	92,5 %
- Perempuan	3	7,5 %
Pendidikan		
- S1	16	40 %
- S2	24	60 %

Tabel IV.3 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
TOT X1	40	58.70	9.611
TOT X2	40	111.40	16.375
TOT Y	40	29.35	2.685
Valid N (listwise)	40		

Dapat dilihat bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen mempunyai nilai rata-rata (*Mean)* total jawaban responden sebesar 58,70 dengan standar deviasi sebesar 9,611. Sedangkan untuk variabel Pengendalian Intern mempunyai nilai rata-rata jawaban responden sebesar 111,4 dengan standar deviasi sebesar 16,375. Dan untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai nilai rata-rata jawaban responden sebesar 29,35 dengan standar deviasi sebesar 2,685.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Nilai korelasi *Pearson's* untuk semua item pernyataan adalah diatas 0,450 kecuali item pernyataan nomor 14, 15, 16 dan 18 yang mempunyai nilai korelasi *Pearson's* dibawah 0,450 sehingga dinyatakan tidak valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain item pernyataan nomor 14, 15, 16 dan 18 semua pernyataan dinyatakan valid dan digunakan dalam pengujian.

b. Validitas Variabel Pengendalian Intern

Untuk variabel Pengendalian Intern, nilai korelasi *Pearson's* untuk semua item pernyataan adalah diatas 0,450 kecuali item pernyataan nomor 26, 27, 28 dan 29 adalah dibawah 0,450. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain item pernyataan nomor 26, 27, 28 dan 29, semua pernyataan dinyatakan valid dan digunakan dalam pengujian.

c. Validitas Variabel Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan kuesioner untuk variabel Kinerja Instansi Pemerintah, nilai korelasi *Pearson's* untuk semua item adalah diatas 0,450 yang disimpulkan pernyataan tersebut adalah valid dan digunakan dalam pengujian.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 Hasil Uji Reliabilitas

Faktor Individual	Jumlah Item	Koefisien *Cronbach Alpha*
Pemanfaatan Teknologi Informasi	14	0.911
Pengendalian Intern	25	0.978

Kinerja Instansi Pemerintah	7	0.868

HIPOTESIS

Tabel IV.8 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.974	3.067		6.513	.000
	TOT X1	.063	.046	.201	1.376	.177
	TOT X2	.068	.024	.407	2.795	.008

a. Dependent Variable: TOT Y

Anova

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60.897	2	30.448	5.116	.011[a]
	Residual	220.203	37	5.951		
	Total	281.100	39			

a. Predictors: (Constant), TOT X2, Tot X1

b. Dependent Variable: TOT Y

Dari tabel IV.8 dapat dilihat variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai *p-value* 0,177 > 0,05 artinya tidak signifikan. Tidak signifikan disini berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Koefisien regresi untuk pemanfaatan teknologi informasi yaitu sebesar 0,063. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Ini berlawanan dengan pendapat Chin dan Todd (1995) dalam Rahadi (2007) yang menyatakan salah satu manfaat teknologi informasi adalah mengembangkan kinerja perusahaan. Bandi (2006) yang meneliti pengaruh pengembangan Teknologi Informasi terhadap kinerja perusahaan juga menghasilkan hasil yang signifikan dan positif. Wijana (2007) dan Mardjiono (2009) juga menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun hal ini dapat diterima karena dari pengumpulan kuesioner dan wawancara dengan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah, ternyata pemanfaatan teknologi informasi baru dalam tahap awal atau tahap persiapan.

Secara umum pemanfaatan TI oleh instansi pemerintah relatif kurang optimal dan belum menunjukan arah pembentukan *e-Government* yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol antara lain adalah pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif dan belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan TI pada masing-masing instansi.

Secara spesifik masih diperlukan upaya pengembangan terus-menerus dan sinergi untuk meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan TI dalam pelayanan publik. Beberapa hal dapat disimpulkan :

- Secara spesifik pemanfaatan TI oleh instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Tingkat penggunaan TI, b) Pengembangan Penggunaan TI, dan c) Perluasan penggunaan TI untuk jejaring dengan *stakeholder*.
- Tingkat optimalitas implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di instansi pemerintah daerah relatif kurang optimal, dan bila dikaitkan dengan karakteristik *e-Gov* sebagaimana yang ditetapkan pemerintah masih perlu perbaikan. Mengingat *e-Gov* tidaklah sekedar website pemerintah, melainkan integrasi manajamen, proses kerja dan pelayanan publik itu sendiri.
- Model pemanfaatan teknologi informasi bagi pelayanan publik disusun oleh faktor-faktor strategis yang menentukan kinerja pelayanan publik berbasis TI, yaitu faktor kebijakan, organisasi, SDM , *software,* dan *hardware.*

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Novita (2008) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja individual akuntan intern pada beberapa bank di Pekanbaru. Hara (2010) juga mendapat hasil yang sama bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap AKIP Kota Pekanbaru.

Untuk variabel pengendalian intern memiliki nilai *p-value* 0,008 < 0,05 artinya signifikan. Signifikan disini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien regresi untuk pengendalian intern yaitu sebesar 0,068 dan bertanda positif. Tanda positif pada koefisien regresi ini menunjukkan hubungan searah antara pengendalian intern dan kinerja instansi pemerintah. Ini berarti apabila faktor lainnya konstan, maka pertambahan 1 poin variabel proporsi pengendalian intern akan menyebabkan meningkatnya kinerja instansi pemerintah sebesar 0,068. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu sosial, biasanya digunakan *Adjusted R Square*. Berikut penjelasan mengenai koefisien determinasi.

Tabel IV.9 Adjusted R Square

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.465[a]	.217	.174	2.440

a. Predictors: (Constant), TOT X2, Tot X1

b. Dependent Variable: TOT Y

Hasil regresi menunjukkan besarnya *Adjusted R Square* sebesar 0.174. Hal ini berarti 17,4% variabel pengendalian intern dapat menjelaskan variabel kinerja instansi pemerintah sebesar sedangkan sisanya 82,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa :

1. Hasil pengujian validitas data terhadap variabel independen terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid. Pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) terdapat 4 pertanyaan yang tidak valid dan pada variabel Pengendalian Intern (X2) terdapat 4 pertanyaan yang tidak valid, sehingga semua pertanyaan yang tidak valid itu dikeluarkan dalam pengolahan data selanjutnya. Sedangkan pada variabel lainnya (Kinerja Instansi Pemerintah) tidak terdapat pertanyaan yang tidak valid.
2. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan semua pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai *Alpha* semua komponen variabel lebih besar dari 60% (Nunnally, 1967).
3. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
4. Hasil pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gangguan autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.
5. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan dengan uji statistik regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,177 atau 17,7%. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dinyatakan ditolak.
6. Variabel Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan dengan uji statistik regresi berganda dimana diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,008. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima.
7. Nilai koefisien determinasi adalah 0,174 atau 17,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pengendalian intern) terhadap variabel dependen (kinerja instansi pemerintah) adalah sebesar 17,4%. Atau variasi variabel independen (pengendalian intern) yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 17,4% variasi variabel dependen (kinerja instansi pemerintah). Sedangkan sisanya sebesar 82,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dalam penelitian ini, penggunaan kuesioner setiap variabel masih menggunakan kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, sehingga rentan terjadi kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh.
3. Keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga mengakibatkan peneliti tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Pada penelitian ini hanya melihat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner setiap variabel sebaiknya menggunakan kuesioner baru yang sesuai dengan keadaan ataupun gambaran keadaan suatu daerah.
2. Objek penelitian sebaiknya diperluas, misalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah Se Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih

jelas mengenai pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh.

3. Dalam hal waktu, hendaklah peneliti selanjutnya dapat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang memungkinkan dalam mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah. Misalnya variabel Kompetensi SDM yang ada, Budaya Organisasi, Komitmen pegawai, ketaatan terhadap peraturan perundangan, penerapan akuntabilitas keuangan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Bandi. 2006. *Pengaruh respon perusahaan dalam investasi teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan: strategi bisnis, kematangan teknologi informasi, dan ukuran perusahaan sebagai variabel anteseden*. Fakultas ekonomi universitas sebelas maret, Surakarta

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik* Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.

Belajar Kilat SPSS 17. Penerbit Andi Yogyakarta dan Elcom Tahun 2010.

Direktorat Aparatur Negara. 2006. Manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi pemerintah (suatu profil).

Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan strategik untuk peningkatan kinerja sektor publik, suatu petunjuk praktek. Gramedia, Jakarta.*

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasibuan, Hara. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknoligi Informasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kota Pekanbaru*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (Ed. 1)*. Yogyakarta: BPFE.

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Jannah, Miftahul. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, studi pada SKPD Kab.Kampar*, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Kirmanto, Djoko. 2008. *Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Departemen Pekerjaan Umum* Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia. Jakarta.

Kajian Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam Pelayanan Publik. 2009. Direktorat Aparatur Negara-BPPN.

LAKIP Kampar Tahun 2009.

Legina, Mutia. 2008. *Pengaruh prinsip Good Governance dan komitmen organisasi dan dimediasi oleh gaya kepemimpinan terhadap kinerja sektor publik.* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Mardiasmo. 2004, Akuntansi Sektor Publik, Edisi II, penerbit Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.

Mardjiono, Didik Eko. 2009. *Analisis Pengaruh kepemimpinan, pemanfataan TI dan implementasi struktur organisasi yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi. studi pada RSUD Kab. Temanggung* , Tesis Universitas Padjajaran.

Muslimin. *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Perilaku dan Pengendalian Personal terhadap Kinerja Manajerial pada PT Berkat Agung Jaya Abadi (Gresik)*. Fakulfas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur Surabaya.

Mustafa, Ii Baihaqi. *Pengendalian Intern dan Pemberantasan Korupsi*. Artikel Warta Pengawasan Vol. Xi/No. 1/Januari 2004.

Novita, Vina. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi yang baru Terhadap Kinerja Akuntan.* Skripsi, Universitas Riau: Pekanbaru.

Parno. 2005. *Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Di Kota Semarang.* Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang.

Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah. BPKP 2000

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. BPK RI 2006.

Prasetyono dan Kompyurini. 2007. *Analisis Kinerja Rumah Sakit dengan pendekatan Balanced Scorecard berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern and Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Makasar : Simposium Nasional Akuntansi.*

Riantiarno, Renaldi. 2010. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Komitmen Organisasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kab. Rohul* , Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Rahadi, Dedi Rianto. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik*. Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta.

Saputra, Dedi Supardi. 2004. *Pengaruh Peran Dewan Komisaris, Formulasi Strategi, Dan Penerapan Pengendalian Intern Serta Pengembangan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Bisnis*. Disertasi Doktor. Universitas Padjajaran: Bandung.

Sihaloho dan Halim. 2005. *Pengaruh faktor-faktor rasional, politik dan kultur . organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi pemerintah daerah. Solo: SNA 8.*

Setiawan, Imran. 2005. *Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Terhadap Kinerja Akuntan.* Skripsi, Universitas Riau: Pekanbaru.

Solikhin, Akhmad. 2006. *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah : Perkembangan dan Permasalahan, Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2 No. 2, November

[Sudarwan Danim. 2004. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*. Bumi Aksara: Jakarta

Tugiman, Hiro. 2000. *Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor-Faktor Pendukungnya Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal Dan Kinerja Perusahaan*. Disertasi Doktor. Universitas Padjajaran: Bandung.

UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional

UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara

UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan pengaruhnya pada kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten tabanan. Jurnal. Universitas Udayana ; Bali.

www. bpk.go.id, 19 Agustus 2010

www.google.com

www.kamparkab.go.id